

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Audit, Jenis - jenis Audit, Tujuan Pemeriksaan Audit

2.1.1.1 Definisi Audit

Berikut ini adalah definisi audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:4) audit adalah sebagai berikut:

“Audit is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Pengertian audit menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Sedangkan definisi audit yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Kegiatan pemeriksaan akuntansi (*audit*) merupakan suatu proses sistematis yang terorganisir dan berupa rangkaian langkah atau prosedur logis untuk dapat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Pengumpulan bukti audit tersebut dilakukan secara objektif dan dengan sikap yang profesional dan independen, lalu auditor tersebut harus dapat menilai kesesuaian antara laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diaudit dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan temuan dan bukti audit yang berhasil dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Setelah auditor tersebut memberi penilaian atas kesesuaian laporan keuangan audit dengan standar keuangan yang berlaku, maka kemudian auditor akan menyampaikan hasil laporan auditnya kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan seperti kreditor, investor, maupun para pemegang saham.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2013:16) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif

2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional (*operational audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit ketaatan (*compliance audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan audit

laporan keuangan (*financial statement audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Audit

Tujuan pemeriksaan akuntansi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bayangkara (2014:7) adalah sebagai berikut:

“Audit keuangan dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (manajemen) telah disusun melalui proses akuntansi yang berlaku umum dan menyajikan dengan sebenarnya kondisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Dari hasil audit ini kemudian akuntan (auditor) memberikan opini sebagai tanda pengesahan atas laporan tersebut, untuk dapat digunakan oleh sebagian besar pemakai laporan keuangan.”

Jadi, tugas utama auditor adalah untuk dapat membuat penilaian mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (manajemen) apakah sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan juga untuk memberi penilaian bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*), sehingga dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan.

2.1.1.4 Standar Auditing

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis dalam SPAP (2011:001.7) terdiri dari:

1. Pernyataan Standar Auditing
2. Pernyataan Standar Atestasi
3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review
4. Pernyataan Jasa Konsultasi
5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik sejak Mei 2000. SPAP meliputi Standar Auditing yang berkaitan dengan kualitas profesional auditor. Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI- Kompartemen Akuntan Publik dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 (2011:150.1) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Umum
 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 2. Dalam semua hal yang berhubungan Dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan
 1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan
 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan Penerapan prinsip Akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informative Dalam laporan Keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.2 Auditor dan Jenis – Jenis Auditor

2.1.2.1 Pengertian Auditor

Suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan. Menurut *International Standard of Organization* (2002:19011) bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:34) tentang auditor bahwa auditor dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pengertian auditor menurut Abdul Halim (2008:15) adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Sedangkan Mulyadi (2002:130) mendefinisikan auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan orang yang profesional dan independen dalam bidang pemeriksaan yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Auditor

Secara umum Arens, Elder & Beasley (2012:14) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo mengklasifikasikan auditor menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Akuntan Publik Terdaftar
Akuntan publik menjual jasa terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya juga menjual jasanya sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain mengaudit informasi laporan keuangan seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN.
3. Auditor Pajak
Auditor pajak merupakan auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan
4. Auditor Intern
Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di satu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal, sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak.

2.1.3 Kompetensi Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

2.1.3.1 Kompetensi Auditor

Menurut Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Menurut Sukrisno Agoes (2014:146) kompetensi adalah :

“suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencukupi. serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:3) mendefinisikan Kompetensi sebagai berikut:

“kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”

Alvin A. Arens et.all (2012:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

”Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan.”

Menurut Theodorus M. Tuannakota (2011:64) kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang di dapat dari pengetahuan, pengalaman, pelatihan”

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas seorang auditor. Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar, simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar/simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya (Suraida, 2005).

2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Auditor

Beberapa karakteristik kompetensi menurut Syaiful F Prihadi (2004:92) terdapat empat karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
2. Karakteristik (*Trains*)
3. Pengetahuan (*Knowladge*)
4. Keterampilan (*Skill*)

Berikut ini akan dibahas secara ringkas mengenai rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)

Motive adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.

2. Karakteristik (*Trains*)

Karakteristik adalah karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi informasi.

3. Pengetahuan (*Knowladge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang tertentu.

4. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari keempat karakteristik di atas penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang karakteristik kompetensi auditor di dukung oleh keempat karakteristik kompetensi auditor yaitu motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan.

2.1.3.3 Komponen Kompetensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:25) Komponen kompetensi untuk auditor terdiri atas:

1. Komponen pendidikan
2. Komponen pengetahuan
3. Komponen pelatihan

Yang dimaksud dari ketiga komponen diatas adalah :

a. Komponen Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

b. Komponen Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu :

1. Pengetahuan pengauditan umum

Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit, prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor diperguruan tinggi, dan

sebagiannya lagi biasanya di dapat auditor dari berbagai pelatihan – pelatihan yang di ikuti auditor dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

2. Pengetahuan area fungsional

Pengetahuan area fungsional yang dimaksud disini adalah pengetahuan di area fungsional seperti perpajakan serta pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area fungsional sebagian di dapat di pendidikan formal perguruan tinggi, dan sebagian besarnya di dapat dari pelatihan dan pengalaman.

3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru

Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru dapat auditor peroleh dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

4. Pengetahuan tentang industri khusus

Pengetahuan tentang industri khusus sama halnya dengan poin – poin sebelumnya pengetahuan tentang industri khusus biasa diperoleh melalui pelatihan – pelatihan dan pengalaman,

5. Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah

Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah diperoleh melalui pelatihan – pelatihan yang auditor ikut serta dan pengalaman yang di miliki auditor.

c. Komponen Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi (Noviyani 2002). Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.et.al, 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan 2005:68). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

2.1.4 Skeptisisme Profesional

2.1.4.1 Pengertian Skeptisisme Profesional

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:462) yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf mendefinisikan skeptisisme professional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut”

Siti Kurnia dan Ely Suharyanti (2010:42) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit”

Dari pernyataan di atas, terdapat poin-poin penting yang merupakan prinsip utama skeptisisme profesional auditor dalam penugasan audit diantaranya. Sebagai seorang profesional, auditor di minta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit. Seorang auditor juga diminta untuk bersikap *skeptic professional* dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap di pertimbangkan. Pada saat yang sama auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujuranya.

Skeptisisme merupakan manifestasi dari obyektifitas. Skeptisisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan. Auditor yang memiliki sikap skeptisme yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan berikut :

1. Apa yang perlu saya ketahui ?
2. Bagaimana cara saya agar dapat mendapatkan informasi dengan baik ?

3. Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal ?

Skeptisisme profesional auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. (Lauwers, 2005 dalam Noviyanti, 2008).

Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota,2011:77).

Auditor yang dengan disiplin menerapkan skeptisisme profesional, tidak akan terpaku pada prosedur audit yang tertera dalam program audit. Skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti yang dikumpulkan, dan seterusnya) (Tuannakota,2011:78)

2.1.4.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional

Hurt, Eining, dan Plumlee (2003) telah membangun sebuah model yang dapat menguraikan masalah skeptisisme profesional dalam konteks audit laporan keuangan ini. Model yang mereka buat tersebut mengatakan bahwa skeptisisme profesional auditor terdiri atas 6 karakteristik, yaitu:

1. Pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*),
2. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*),

3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*),
4. Pemahaman antarperorangan (*interpersonal understanding*),
5. Percaya diri (*self confident*), dan
6. Penentuan Sendiri (*self determination*).”

Yang dimaksud dari keenam karakteristik skeptisisme profesional adalah sebagai berikut :

1. Pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu
2. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*), yaitu karakteristik yang mengidentifikasi seorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut
3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*), yaitu karakteristik yang didasari rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.
4. Pemahaman antarperorangan (*interpersonal understanding*), yaitu pemahaman sikap skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, integritas, dari penyedia informasi.
5. Percaya diri (*self confident*), yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan dan
6. Penentuan Sendiri (*self determination*) sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

Kemudian keenam hal ini akan membawa seorang auditor pada 4 peningkatan sikap skeptis, yaitu:

1. Peningkatan dalam hal pencarian tambahan,
2. Pendeteksian hal-hal yang kontradiktif,
3. Alternatif hal-hal yang mungkin terjadi, dan
4. Penelitian cermat atas keandalan suatu sumber

2.1.4.3 Unsur – unsur Skeptisisme Professional

Unsur-unsur skeptisisme professional dalam definisi *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam (Tuannakotta:78) :

1. *A critical assessment*-ada penilaian yang kritis tidak menerima begitu saja;
2. *With a questioning mind*-dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan mempertanyakan;
3. *Of the validity of audit evidence obtained*-kesahihan dari bukti audit yang diperoleh
4. *Alert to audit evidence that contradicts*-waspada terhadap bukti yang kontradiktif;
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information*-mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and those charged with governance*-yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

Skeptisisme profesional berakar dari konsep keberatan. Para auditor diharapkan untuk dapat cukup skeptis mengenai motif-motif manajer dan akurasi dari neraca serta pengungkapan yang dibuat oleh manajemen. Deutsch (1986) dan Shaub (1996) mendefinisikan pilihan yang mencurigakan sebagai suatu pilihan untuk terlibat dalam perilaku untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi dari perilaku

orang lain. Perilaku pencegahan adalah konsisten dengan tanggung jawab auditor, pencegahan yang dilakukan oleh auditor salah satunya adalah mengawasi sikap dan perilaku manajemen ketika sedang dilakukan pengujian audit. Resiko yang paling mengganggu di dalam audit yang dipandang dari sudut pandang kecurigaan adalah tekanan dari pada kepercayaan, sehingga seorang auditor harus dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai respon langsung terhadap kecurigaan pada klien.

2.1.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Skeptisisme Professional

Siegel dan Marconi (1989) dalam Noviyanti (2008) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh:

1. Faktor sosial (kepercayaan),
2. Faktor psikologikal (penaksiran risiko kecurangan), dan
3. Faktor personal (kepribadian).

2.1.5 Kecurangan (Fraud)

2.1.5.1 Pengertian Kecurangan (Fraud)

Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Koroy (2008) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit

dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan
2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Identifikasi atas faktor-faktor penyebab, menjadi dasar untuk kita memahami kesulitan dan hambatan auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan. Meski demikian faktor-faktor itu tidaklah menjadi alasan untuk menghindarkan upaya pendeteksian kecurangan yang lebih baik.

Kecurangan (*fraud*) perlu dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Perbedaan antara kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) terdapat pada tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kekeliruan dapat dideskripsikan sebagai “*unintentional mistakes*” (kesalahan yang tidak disengaja). Kekeliruan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, dari terjadinya transaksi, pendokumentasian, pencatatan, pengikhtisaran hingga proses menghasilkan laporan keuangan. Kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja

Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikatakan tindakan kecurangan (*fraud*). Dan salah satu kesulitan terbesar bagi

auditor dalam mengungkap *fraud* adalah bagaimana cara mengevaluasi dan menilai apakah salah saji material yang terjadi dilakukan dengan dasar kesengajaan atau tidak. Bagaimanapun, kegiatan audit bukan ditujukan untuk menentukan adanya kesengajaan atau tidak, kewajiban auditor yang paling utama adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan bukti yang cukup dan memadai untuk kemudian dapat menilai apakah laporan keuangan audittee bebas dari salah saji material atau tidak tanpa peduli salah saji material tersebut disengaja atau tidak. Untuk dapat mencegah dan mengungkap tindak kecurangan, terlebih dahulu seorang auditor harus mengetahui jenis-jenis kecurangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, serta teknik dalam mencegah tindakan kecurangan

2.1.5.2 Jenis – Jenis Kecurangan

Menurut Examination Manual 2006 dari Association of Certified Fraud Examiner dalam Karyono (2013: 17-24), kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

- a. Kecurangan Laporan (fraudulent statement)
yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (financial statement) dan kecurangan laporan lain (nonfinancial statem menyajikan laporan keuangan lebi baik dari sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya.
- b. Penyalahgunaan Aset (asset misappropriation)
yang terdiri atas kecurangan kas, dan kecurangan persediaan dan aset lain.
- c. Korupsi (corruption)
terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan kelompok tertentu.

- d. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer, dapat berupa menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.

Sedangkan menurut Reksojoedo (2013: 31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

- a. Pencurian (the act)
adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil aset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b. Penyembunyian (concealment)
adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi, atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan). Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan
- c. Perubahan (conversion)
adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

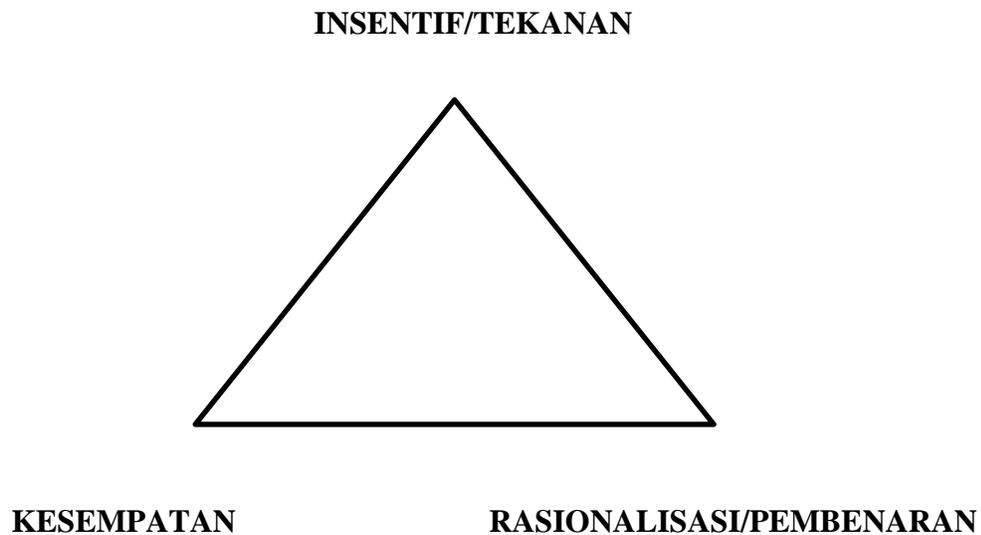
Segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam apapun bentuknya akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, Karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

2.1.5.3 Pemicu Terjadinya Kecurangan

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2013:433) pemicu terjadinya kecurangan ada tiga

kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang atau penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316) seperti dalam gambar 2.1, ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

1. Insentif/tekanan
Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan
2. Kesempatan
Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan tindak kecurangan.
3. Sikap/rasionalisasi
Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada di dalam lingkungan yang cukup menekan membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.



Gambar 2.1 Segitiga Kecurangan

Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan resiko kecurangan.

2.1.5.4 Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Pada dasarnya tindak kecurangan dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak kecurangan yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang rawan terjadi kecurangan. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan menurut (Fitriany,2012:7) Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

“kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut”

Audit akan dapat berjalan secara efektif jika mampu dalam mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut (SAS No. 99):

1. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangan dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan

2. Mendiskusikan di antara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan
3. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan
4. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan
5. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun
6. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan. Respon yang harus diberikan oleh auditor adalah:
 - a. Respon bahwa risiko keuangan memiliki efek pada bagaimana audit akan dilaksanakan
 - b. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang akan dilaksanakan
 - c. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan
7. Mengevaluasi hasil audit. Audit harus mengevaluasi:
 - a. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan audit
 - b. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantive atau review keseluruhan tahap audit yang

mengidentifikasi tidak ditemukan risiko salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan

- c. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat audit hampir selesai dilaksanakan
8. Mengkomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain
9. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh auditor mengenai kecurangan. Dokumentasi itu dalam bentuk:
 - a. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim audit dalam perencanaan audit dalam hubungannya dengan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas.
 - b. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan
 - c. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon auditor atas hal tersebut
 - d. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu
 - e. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka auditor diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan pengauditan yang sekaligus dapat lebih

efektif dalam mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan serta menghindari tuntutan hukum dikemudian hari.

Fullerton dan Durtschi (2004) dalam literturnya menyatakan bahwa gejala *fraud* dapat dikategorikan menjadi :

1. Gejala kecurangan yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan
2. Gejala yang terkait dengan catatan keuangan dan praktik akuntansi.

kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasi adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota,2011:77).

Red flags merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, red flags adalah petunjuk atau indikator akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Red flags tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak, tetapi red flags ini merupakan tanda-tanda peringatan bahwa fraud mungkin terjadi (Hevesi, Alan G.,Pattison, Mark P). Sebagaimana dijelaskan dalam standar auditing SA seksi 316- Pertimbangan atas kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, salah saji dalam pelaporan keuangan dapat timbul dari fraud, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung fraud dan penyalahgunaan asset. Secara garis besar, terdapat tiga faktor resiko fraud yang berkaitan dengan fraud dalam pelaporan keuangan (Kenyon, Will, 2006) :

- a. Karakteristik manajemen yang berkaitan dengan kemampuan manajemen, tekanan, sikap dan perilaku terhadap pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan.
- b. Karakteristik industri yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku.
- c. Karakteristik operasional dan stabilitas keuangan yang meliputi sifat dan kerumitan dari transaksi perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan.

Jika dikaitkan dengan pelakunya, fraud dalam pelaporan keuangan pada umumnya dilakukan oleh manajemen, dan kondisi yang memungkinkan adanya fraud, yang harus diwaspadai diantaranya adalah:

1. Manajemen enggan menyediakan data untuk auditor eksternal.
2. Sering terjadi penggantian auditor eksternal.
3. Pengendalian intern perusahaan kurang memadai.
4. Terdapat banyak transaksi pada akhir tahun.
5. Terdapat dokumen yang hilang dan tidak dapat ditemukan.
6. Sering melakukan pergantian rekening bank.
7. Hutang yang diperpanjang terus menerus.
8. Tingkat perputaran karyawan tinggi.
9. Penjualan aktiva perusahaan di bawah harga pasar.
10. Adanya transaksi yang tidak masuk akal.

2.1.5.5 Elemen – Elemen Penting yang Membantu Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Karyono (2013: 92-94) langkah awal mendeteksi kecurangan ialah: memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha.

Salah satu elemen paling penting dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan:

1. Pengujian pendalian intern
2. Dengan audit keuangan atau audit operasional
3. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi
4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Yang dimaksud dari poin – poin diatas tentang upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah :

a. Pengujian pengendalian intern

Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi fraud yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.

b. Dengan audit keuangan atau audit operasional

Seorang auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga fraud dapat terdeteksi.

c. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Dijelaskan bahwa pendeteksian ini dilakukan secara tertutup atau diam-diam mencari informasi tentang orang yang sedang dicurigai.

d. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur

Dimaksud antara lain:

1. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan;
2. Transaksi-transaksi yang janggal seperti waktu transaksi hari minggu atau hari libur;
3. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun;
4. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.

e. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi

f. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

2.3.1 Kerangka Pemikiran

2.3.2 Kompetensi Auditor dengan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut *International Standard of Organization* (2002:19011) bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Maka disini auditor harus memiliki kompetensi agar dalam pelaksanaan audit dapat mendeksi adanya kecurangan.

Sikap kompeten diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut. Keahlian yang dimiliki auditor dapat menjadikannya lebih sensitive (peka) terhadap suatu tindak kecurangan (Sri Lastanti, 2005 Vol. 5 No.1).

Ardini dan Sawarjuwono (2005) juga menyatakan untuk mengungkap kecurangan, auditor memerlukan kompetensi yang diperoleh dari keahliannya. (Alim, dkk 2007) juga membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, di mana salah satu indikasi kualitas audit yang baik adalah jika kecurangan yang ada dalam audit tersebut dapat dideteksi.

2.3.3 Skeptisisme Profesional dengan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

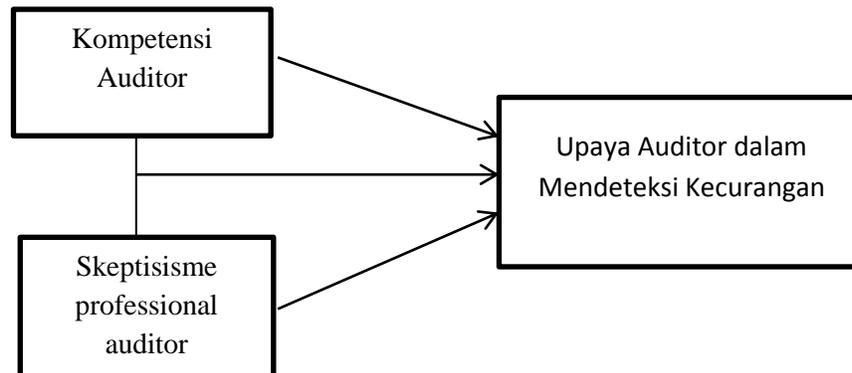
Skeptisisme professional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap

tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota,2011:77).

SAS 1 (AU230) mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya audit harus di rencanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional atas semua aspek penugasan. Alvin Arens (2012:186)

Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) dalam Eko Ferry Anggriawan (2014) auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan dari pada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang rendah, dan hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya *fraud* karena informasi yang mereka miliki tersebut. Dengan demikian, semakin besar skeptisisme profesional seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kemampuan dalam upaya mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2007) tentang skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Dengan kesimpulan bahwa jika auditor diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan, dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berasarkan seluruh uraian mengenai Pengaruh Kompetensi Auditor dan Skeptisisme Professional Auditor Terhadap Upaya Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan yang telah disebutkan di atas, Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis penelitian, yaitu:

Ha1 : Kompetensi Auditor Berpengaruh Terhadap Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Ha2: Skeptisisme Profesional Auditor Berpengaruh Terhadap Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Ha3 : Kompetensi Auditor Dan Skeptisisme Professional Auditor Berpengaruh Terhadap Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan